

PERKEMBANGAN EKONOMI GLOBAL

Oleh: Hafulyon*

***Abstract:** Countries in the world face different forms of economic developments in the field of regional trade, domestic and international, the United States dollar increase in events that coincide with the occurrence of a deficit in trade balance and current transactions, result in unemployment accompanied by high inflation, a flexible exchange rate system is not able to stimulate the growth of global trade and a range of economic growth. This fact cannot be separated from some of the economic concept of development as the paradigm adopted in the design of economic policy because the experts were trying to trace back the development of economic concepts, which gave birth to a new paradigm that is different from the previous paradigm.*

Kata kunci: ekonomi, global

PENDAHULUAN

Negara maju maupun negara berkembang menghadapi berbagai perkembangan bentuk ekonomi. Kenyataan ini dapat dilihat dalam bidang perdagangan domestik, regional dan internasional. Krisis ekonomi global yang terjadi beberapa waktu yang lalu, memang benar-benar memerosotkan iklim ekonomi di jagat raya ini, diantaranya bermula dari bisnis perumahan (*Subprime Morta-ge*). Di Amerika Serikat sejak Juli 2007, dan krisis finansial lainnya yang ada di Amerika Serikat dengan cepat menyebar ke seluruh dunia, hampir semua negara terkena implikasinya.

Kenyataan ini tidak dapat dilepaskan sama sekali dari beberapa

perkembangan konsep ekonomi sebagai paradigma yang dianut dalam merancang kebijakan ekonomi. Dalam kaitan ini, para ahli telah mencoba menelusuri kembali beberapa perkembangan konsep ekonomi. Hasil-hasil pengkajian mereka melahirkan paradigma baru yang berbeda dari paradigma sebelumnya.

Tulisan ini mencoba memunculkan perkembangan ekonomi global, sekaligus pergeseran-pergeseran yang terjadi dalam filosofi pemikiran ekonomi. Berdasarkan hal ini dicoba pula untuk mengemukakan beberapa konsep tentang ilmu ekonomi masa lalu dan masa depan secara global dan termasuk ekonomi Islam yang diyakini relevan dengan persoalan-persoalan sosial ekonomi yang

* Penulis adalah Lektor dalam Mata Kuliah Dasar-Dasar Manajemen STAIN Batusangkar

dihadapi masyarakat hari ini yang semakin kompleks.

PERKEMBANGAN KONSEP EKONOMI

Dalam perkembangan sejarah, ternyata filsafat-filsafat yang melandasi konsep-konsep ekonomi silih berganti. Terjadinya perkembangan konsep baru menggantikan konsep yang lama karena sering melalui masa transisi yang cukup lama. Hal ini pada satu sisi disebabkan oleh orientasi kehidupan masyarakat yang mengalami perubahan dan pada sisi lain diperkuat oleh tantangan-tantangan dan peluang-peluang baru yang timbul dalam masyarakat, yang menimbulkan beberapa konsep perkembangan ekonomi global.

Konsep Klasik Adam Smith

Dalam kajian ilmiah, ilmu ekonomi diakui sebagai suatu disiplin ilmu pada abad XVIII, tepatnya setelah Adam Smith menerbitkan bukunya "*An Inquiry Into the Nature and Causes Of The Wealth of Nation*" pada 1776. Dasar pemikiran Adam Smith tentang masalah ekonomi berasal dari konsep-konsep ekonomi yang dikemukakan oleh para filsuf seperti Socrates, Plato dan Aristoteles. (Sukirno Sadono: 2005:3).

Pada awalnya, konsep ekonomi yang direkonstruksi oleh Adam Smith sangat diwarnai dimensi moral dan etik, dengan menerbitkan buku *The Theory of Moral Sentiment* karena buku ini selalu menghubungkan masalah ekonomi dengan moral, sesuai dengan bidangnya sebagai seorang guru besar dalam filsafat mo-

ral pada University of Glasgow. Pada waktu itu ilmu ekonomi disebut dengan *political economy* yang belum memisahkan diri dari filsafat, politik, hukum dan ilmu-ilmu sosial lainnya. Gagasan yang dibangun oleh Adam Smith telah dilandasi oleh beberapa paradigma seperti *economic freedom*, *self interest*, *competition* dan *laissez faire*. Selain itu, dikemukakan pula sumber-sumber kemakmuran bangsa dan sebab musabab terjadinya kemiskinan dalam suatu masyarakat. Hal ini mencerminkan bahwa pemikiran ekonomi pada awalnya dilandasi oleh filosofi moral dan etik (Deliarnov, 1997 : 24).

Dalam permasalahan ekonomi Socrates berpijak pada nuansa moral dan etik. Itulah sebabnya ia menentang orientasi kehidupan materialistis. Sementara itu, Plato juga menentang jiwa komersialisme dan Aristoteles di pihak lain menentang bunga uang yang dianggap sebagai pendapatan yang dikecam secara etik (Mini, 1974). Konsep-konsep inilah yang dikembangkan kaum merkantilis dan fisiokrat, yang sistematis dan rasional oleh Adam Smith dan kawan-kawannya kaum klasik.

Dalam perkembangan berikutnya, Adam Smith mengembangkan dan membuat pemikiran untuk melakukan kesejahteraan umum melakukan sistem baru yang bernama kapitalisme Negara yang konsep sebelumnya sistem kapitalis murni, yang dipengaruhi Friedrich List (1789-1846) dan selanjutnya muncul kapitalis campuran yang dipengaruhi oleh pemikiran Adolf Wagner (Peter F Drucker: 1989:159).

Penghargaan terhadap sistem ekonomi pasar yang diciptakan Smith bukan karena sistem ini pe-

lik dan *complicated*, tetapi justru karena kesederhanaannya. Sistem ekonomi pasar tidak membutuhkan perencanaan dan pengawasan dari pihak manapun. Jika banyak campur tangan pemerintah, pasar justru akan mengalami distorsi, yang pada gilirannya akan membahas bahwa perekonomian pada *inefficiency* dan ketidakseimbangan. Ajaran Perekonomian Liberal Smith menandai adanya perubahan yang revolusioner dalam pemikiran ekonomi. Orang sering keliru menganggap bahwa sistem ekonomi liberal yang didasarkan pada paham individualisme ini akan mengakibatkan terganggunya harmoni sosial. Akan tetapi Smith berpandangan sebaliknya. Walau tiap orang didorong untuk mengejar kepentingan masing-masing, adanya persaingan bebas akan menjamin bahwa masyarakat secara keseluruhan akan menerima *benefit*. Negara-negara yang menganut sistem ekonomi pasar terbukti menikmati tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sedang negara-negara yang mengabaikan kekuatan mekanisme pasar dalam mengalokasikan sumber daya dan mendistribusikan barang dan jasa tertatih-tatih dalam melaksanakan pembangunan. Adam Smith menekankan *invisible hand* dalam mengatur pembagian sumber daya, oleh karenanya peran pemerintah menjadi sangat dibatasi karena akan mengganggu proses ini, konsep ini dipresentasikan sebagai mekanisme pasar sebagai karya sebagai instrumen utamanya. (Deliarnov, 1997 : 35-37).

Pengaruh Konsep Neo-Klasik dan Keynes

Hasil pemikirannya dalam literatur sejarah perkembangan ekonomi digolongkan dalam Aliran Neo-Klasik. Tokohnya yang terkenal adalah Alfred Marshall dengan bukunya "*Principles of Economics*" 1890. Bila ditelusuri, pemikiran Marshall dan dibandingkan dengan pemikiran awal Adam Smith, telah mulai terjadi pergeseran, baik dalam filosofi maupun ruang lingkup ilmu ekonomi itu sendiri.

Konsep Neo-Klasik mengajukan pengertian lain, bahwa inti kegiatan ekonomi itu adalah aspek pilihan dalam menggunakan sumber daya yang langka (Dawam, 1999:6-7). Perilaku ekonomi masyarakat bertujuan mencapai efisiensi dan menemukan keseimbangan yang optimal. Fokusnya tertuju pada masalah alokasi yang efisien melalui sistem harga. Bersama dengan itu, Marshall dengan kemampuannya yang luar biasa dalam ilmu matematika mengembangkan model kuantitatif dalam mempelajari perilaku ekonomi masyarakat. Dia membangun model-model ekonomi yang mengikuti alur berfikir deduktif dan pendekatan yang bersifat abstraksi/simplifikasi. Dengan model dan pendekatan ini ilmu ekonomi dianggap sebagai disiplin ilmu yang lebih akurat dan lebih teknis matematis. Secara filosofis, pendekatannya lebih berpijak pada filsafat materialistik, individualistik dan hedonistik. Fakta ini menunjukkan terjadinya pergeseran filosofis yang mendasar dalam perkembangan kon-

sep ilmu ekonomi, yakni dari filsafat moral etik ke filsafat materialistik.

Dalam perkembangannya ternyata pemikiran ekonomi sampai sekarang masih diwarnai oleh *logical positivism* ini. Bila dikaitkan dengan hakikat dan tujuan kehidupan manusia, fakta tersebut sangat merisaukan kita semua, Karena dasar filosofisnya sangat kering dari dimensi moral dan etik. Dalam menganalisis fakta ekonomi perilaku masyarakat diabstraksikan untuk dinyatakan dalam bentuk model-model ekonomi yang bersifat kuantitatif. Untuk memudahkan pengamatan, mula-mula faktor-faktor yang tidak relevan dikeluarkan dari kejadian yang sedang diamati. Dalam langkah selanjutnya faktor-faktor yang relevan tetapi bersifat non ekonomi juga dikeluarkan. Seluruh faktor yang dikeluarkan tersebut dianggap konstan.

Dasar filosofi materialistik dan individualistik menekankan bahwa setiap individu bebas melakukan aktivitas ekonomi dalam rangka memaksimalkan pencapaian tujuannya. Logika berfikirnya diwarnai oleh dimensi positif rasional, bukan lagi moral-etik. Dengan logika berfikir yang demikian, hasil kerja manusia hanya dijustifikasi secara ekonomis dan terlepas sama sekali dari justifikasi moral dan etik. Dengan demikian, secara positif rasional, jual beli seks bisa dianggap rasional karena bisnis ini merupakan jasa sebagaimana jasa-jasa lain yang dapat membuat kedua pihak menjadi *better off*. Fakta ini tidak mungkin terjadi jika logika berfikir masyarakat diwarnai oleh dimensi etik.

Dengan logika berfikir ini, manusia dipagari oleh nilai-nilai bersama sebagai pembatas perilaku ekonomi masyarakat.

Dalam Ekonomi Neo-klasik dikemukakan bahwa perkembangan *output* merupakan fungsi dari sumber daya alam, tenaga kerja, dan stok kapital. Di antara ketiga *input* produksi tersebut yang dianggap sangat penting artinya dalam proses perkembangan *output* adalah faktor stok kapital (Mini, 1974 ; Roll, 1958 ; Lendreth, 1994). Dengan dasar berfikir demikian, sering dinyatakan bahwa pembangunan identik dengan perkembangan ekonomi, sehingga buku teks ekonomi pembangunan sebagian besar berisikan tentang perkembangan dan aspek-aspek lain yang berhubungan dengannya (Jhingan, 1979).

Perkembangan *output* dapat diukur dan dirumuskan atas dasar hubungan komoditas dan proses produksi. Bagi ekonomi, penekanan terhadap produksi adalah suatu keharusan, sehingga tidak mengherankan apabila pandangan umum tentang pembangunan akan memberikan penekanan pada perkembangan produksi dan sering dijadikan sebagai ukuran keberhasilan pembangunan. Namun, kerangkanya sangat mungkin sekali berbeda apabila keberhasilan pembangunan diukur atas dasar kemiskinan, ketimpangan, dengan adanya pengangguran dan ketidakadilan. Hal ini merupakan kelemahan yang sangat mendasar dari pendekatan pembangunan yang didasari atas perkembangan. Ironisnya kerangka analisis ini sering digunakan para ekonomi. Konsekuensinya

pembangunan seolah-olah merupakan fungsi dari investasi, teknologi, orientasi pasar skala ekonomi, dan sumber daya ekonomi lainnya. Tanpa mengendogenkan aspek kelembagaan dalam proses pembangunan, bukan tidak mungkin terjadi kemiskinan, pengangguran, ketimpangan dan ketidakadilan. Meningkat sejalan dengan ekonomi seperti yang banyak dialami oleh negara berkembang dewasa ini. Fakta yang dikemukakan di atas menunjukkan pendekatan mekanistik yang dianut oleh para ekonomi Neo-Klasik. Berdasarkan pendekatan ini, upaya memacu perkembangan ekonomi hanya dilakukan dengan jalan mengotak atik variabel investasi dan teknologi. Dalam konteks analisis kebijaksanaan, kerangka analitik ini hanya memenuhi *necessary condition* dan tidak dapat memenuhi *sufficient condition*.

Pada satu sisi, teknologi memang dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas, namun pada sisi lain ditemukan pula permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita (pengangguran, kemiskinan, ketimpangan dan ketidakadilan) yang ternyata tidak dapat semata-mata diatasi oleh pengembangan teknologi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kelaparan/kemiskinan bukan karakteristik dari komoditas melainkan karakteristik hubungan antara orang dengan orang lain terhadap komoditas. Implikasinya, peningkatan surplus pangan dengan sendirinya tidak dapat menghilangkan kelaparan apabila kita memakai kerangka analitik yang bersifat mekanistik, dan lembaga yang mengatur interde-

pendensi tidak cukup efektif dalam mendistribusikan pangan ke seluruh lapisan masyarakat.

Uraian di atas mengindikasikan pentingnya mengendogenkan aspek kelembagaan dalam kerangka analisis kebijaksanaan. Dasar berfikirnya, setiap individu yang berperilaku rasional akan menggunakan sumber daya yang langka secara efisien. Proses pengambilan keputusan oleh individu tersebut tidak dibuat pada dunia yang hampa melainkan dalam suatu sistem sosial budaya tertentu. Dalam sistem tersebut, masyarakat menganut nilai-nilai budaya tertentu yang dijadikan sebagai pedoman perilaku. Atas dasar pemikiran ini, efisiensi bukan hanya ditentukan oleh kemampuan individu dalam memilih alternatif yang tersedia, akan tetapi juga ditentukan oleh kesempatan yang tersedia bagi setiap individu untuk melakukan pilihan. Mengingat kesempatan merupakan fungsi dari kelembagaan, maka pendekatan yang bersifat mekanistik akan menimbulkan dampak yang berbahaya dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, dalam konteks analisis kebijaksanaan, kerangka analitik yang diperlukan bukan hanya memperhatikan sistem ekonomi sebagai sistem komoditas tapi juga sebagai sistem kelembagaan dan sistem manusia. Istilah sistem menunjuk pada adanya interdependensi dalam dan antar sistem tersebut (Bromely, 1982).

Dengan memandang sistem ekonomi sebagai sistem komoditas, sistem kelembagaan dan sistem manusia, berarti harga yang ditentukan

oleh permintaan dan penawaran sebenarnya merupakan fungsi dari institusi yang berada di belakang konsumen, produsen, pemerintah dan partisipasi pasar lainnya. Dengan demikian institusilah yang menentukan efisiensi bukan sebaliknya. Hal ini berarti bahwa setiap partisipan pasar, perilaku yang ditampilkan dalam melakukan transaksi sangat dipengaruhi oleh tatanan kelembagaan yang ada. Apakah tatanan kelembagaan sesuai dengan kondisi yang dapat melahirkan efisiensi atau sebaliknya. Berdasarkan kerangka pemikiran ini konsep efisiensi yang relevan adalah *X-efficiency* 2 bukan *allocative-efficiency*.

Persoalan lain yang dianggap mendasar dan perlu dikemukakan dalam tulisan ini adalah masalah *initial resource endowment* dan kecenderungan negara-negara berkembang mengadopsi teori ekonomi barat bagi pemecahan masalah ekonomi mereka.

Bila dilihat dari sisi sistem ekonomi sebagai sistem kelembagaan maka mengadopsi teori ekonomi konvensional bagi pemecahan persoalan ekonomi negara berkembang merupakan suatu hal yang sangat riskan dan kurang relevan.

Struktur dan tatanan kelembagaan negara maju dan negara berkembang sangat berbeda. Tatanan kelembagaan negara maju lebih cenderung dapat mendukung dan sesuai dengan tuntutan pembangunan, sementara di negara berkembang masih banyak ditemukan tatanan kelembagaan yang tidak sesuai dan merintang proses pembangunan. Seperti ditemukan fakta *dualingual* ekonomi, sikap men-

tal penduduk yang tidak mendukung pembangunan, etos kerja dan motivasi kerja yang rendah, undang-undang dan aturan-aturan yang melahirkan distorsi pasar. Dilihat dari proses kelahiran dan proses perkembangannya, dalil-dalil dan postulatnya berpijak dari fakta ekonomi yang terjadi di negara barat. Oleh karena itu, kurang tepat dikatakan sebagai *general theory* tapi *special case theory* sehingga ditemukan banyak keterbatasan untuk dapat diterapkan di negara berkembang. Negara maju sudah berhasil mencapai *sustained growth*, perhatian terutama sekali ditujukan pada pencapaian alokasi sumber daya yang optimum, *full employment* dan berupaya jangan sampai terjadi suatu *secular stagnation*. Sedangkan ekonomi negara berkembang pada umumnya baru akan mulai *take off*, masih mengutamakan perkembangan di samping redistribusi pendapatan yang lebih merata. Hal ini bukan berarti teori ekonomi barat tidak relevan sama sekali bagi negara berkembang, namun dalam tahap implementasi kebijakan yang dirancang atas teori tersebut sangat diperlukan kreatifitas berfikir para ekonomi negara berkembang dalam melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan tatanan kelembagaan yang ada (kondisi sosial, politik, dan budaya).

Initial resource endowment, merupakan isu utama lain yang harus diperhatikan dalam paradigma ekonomi Neo-Klasik. Dalam, paradigma ini (*economic freedom, self interest, competition, dan laissez faire*) diasumsikan perekonomian dapat menghasilkan optimalisasi dalam,

alokasi dan pemanfaatan sumber daya ekonomi, sesuai dengan norma efisiensi Pareto. Pada gilirannya, secara makro hal tersebut dapat menciptakan *social welfare* yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat. Kondisi yang demikian dapat dicapai dengan anggapan bahwa setiap, perilaku ekonomi memiliki *resource endowment* yang sama baik dalam bentuk sumber daya fisik maupun dalam bentuk sumber daya non fisik (informasi dan *power*). Pasar akan dapat menciptakan transaksi yang efisien dan adil apabila kondisi tersebut terpenuhi. Namun fakta yang demikian tidak ditemukan di negara berkembang. Dalam hal ini, kesenjangan kepemilikan sumber daya di antara pelaku ekonomi merupakan fakta actual. Konsekuensinya, ekonomi pasar yang diprediksikan oleh ekonomi klasik mampu untuk menciptakan efisiensi, mengalami kegagalan total. Bukan kemakmuran dan keadilan merata yang ditemukan di negara berkembang, melainkan semakin kentarnya ketidakadilan, ketidakmerataan dan pengangguran, walaupun pada sisi lain terjadi perkembangan ekonomi yang semakin meningkat. (Deliarnov, 1997 hal 97-111).

Berdasarkan konsep di atas, masalah kesenjangan kepemilikan sumber daya dapat dipandang sebagai isu utama, dimana ekonomi pasar, dimana ekonomi pasar: dipandang gagal, dalam menangani masalah ini (*market failure*). Dari kenyataan ini tidak sedikit sistem ekonomi digerakkan atas dasar prinsip-prinsip ekonomi pasar yang justru memperburuk keadaan.

Depresi ekonomi yang melanda sebagian besar sistem per-ekonomian pada tahun 1930 merupakan bukti nyata kegagalan sistem ekonomi pasar. Dalam dekade terakhir ini, fakta tersebut juga muncul pada sebagian besar negara berkembang walaupun dengan warna yang agak berbeda seperti pengangguran, kemiskinan, ketimpangan dan ketidakadilan semakin kentara sejalan dengan perkembangan ekonomi. Hal ini mengindikasikan sekaligus memberi bukti nyata bahwa mekanisme pasar tidak dapat memecahkan masalah. Ketimpangan, ketidakadilan, kemiskinan dan pengangguran, disamping masalah lain yang timbul sejalan dengan proses pembangunan seperti eksternalitas dan komoditas publik.

Kesenjangan sosial antar sektor, antar wilayah, ataupun antar waktu disebagian besar negara berkembang termasuk Indonesia, menuntut adanya pendekatan lain yang dianggap lebih baik dari hanya sekedar pendekatan pasar yang didasari oleh kelembagaan *ownership*. Satu hal yang sering dilupakan para ekonom adalah apa yang disebut *Boulding* dengan *grant economy*. Bentuk *grant* yang paling penting dalam ekonomi adalah cinta (*love*) yang diwujudkan dalam bentuk respek, tanggung jawab, disiplin, jujur, kerja keras dan nilai-nilai lain yang senada. Semua variabel ini jelas merupakan variabel non-ekonomi. Namun agar pasar dapat bekerja secara optimal, maka sangat dibutuhkan sejumlah derajat minfinal dari variabel-variabel tersebut. Dengan memandang ekonomi sebagai sistem kelembagaan, maka *grant* tersebut

merupakan hal yang sangat krusial. Sementara dalam paradigma neo-klasik aspek inilah yang di-abaiakan.

Kelemahan utama paradigma Neo-Klasik telah dikoreksi oleh ekonom terkenal berkebangsaan Inggris J. M. Keynes. Hasil koreksinya tersebut ditulis dalam bukunya "*The General Theory of Employment, Interest, and Money*" tahun 1936.

Konsep Keynes, perekonomian dunia pada 1930-an dinamakan *The Great Depression* disebabkan oleh kesalahan penataan sistem ekonomi. Orang terlalu yakin dengan mekanisme pasar sebagai pengatur alokasi sumber daya ekonomi sehingga ekonomi klasik menolak intervensi pemerintah kecuali dalam hal penyediaan barang publik dan pertahanan keamanan. Revolusi yang dilancarkan Keynes adalah menolak kerangka dasar ekonomi klasik.

Salah satu yang sangat mendasar ialah mengenai perlunya campur tangan pemerintah dalam mengendalikan sistem perekonomian. Keynes yakin sepenuhnya bahwa penyakit-penyakit ekonomi seperti pengangguran, inflasi, ketimpangan dan ketidakadilan tidak mungkin dapat diatasi melalui mekanisme pasar.

Dengan keyakinan tersebut perekonomian perlu dikendalikan secara aktif oleh pemerintah sehingga dapat menghasilkan performance yang perlu dikendalikan adalah *aggregate demand*. Variabel inilah yang berkaitan dengan masalah inflasi dan pengangguran.

Pada awalnya revolusi dari Keynes ini mendapat tantangan yang cukup keras dari ekonom, karena telah menjungkirbalikkan para-

digma yang telah diyakini oleh masyarakat dalam waktu yang cukup lama. Namun berkat ketegaran dan keyakinan Keynes, dia berhasil mempengaruhi para ekonom, karena pada saat itu revolusinya secara berangsur-angsur berhasil memulihkan perekonomian dunia dari keadaan depresi.

Dalam perkembangan berikutnya, teori Keynes pada akhirnya mengalami kegagalan karena adanya kelemahan yang melekat pada teori tersebut. Kegagalannya ditandai oleh terjadinya *stagflasi* pada awal 1970-an. Kebijakan fiskal dan moneter ala Keynes tidak mampu mengatasi inflasi yang diikuti oleh pengangguran yang tinggi.

Fakta stagnasi terjadi karena konsep Keynes beranggapan bahwa pengangguran dan inflasi hanya disebabkan oleh rendahnya *aggregate demand* dalam perekonomian, pada hal fakta ekonominya yang terjadi pada 1970-an tersebut cukup berbeda dengan kondisi 1930-an. Pengangguran dalam dekade terakhir ini bukan hanya disebabkan oleh lemahnya sisi permintaan, akan tetapi berkaitan dengan masalah struktural, tidak baiknya sistem insentif, adanya rintangan dan distorsi dalam pasar tenaga kerja. Semua gejala tersebut tidak tercakup dalam konsep Keynes. Kejadian ini telah memudahkan pamer pendekatan Keynes yang hanya berpijak pada sisi permintaan.

Persoalan lain yang perlu dikemukakan adalah konsep Keynes dalam hal intervensi aktif pemerintah dalam mengendalikan perekonomian. Sebagian besar negara berkembang sampai saat ini kebijaksa-

naan perekonomiannya diwarnai dari konsep Keynes. Namun adanya kelemahan lembaga pemerintah menyebabkan kebijaksanaan tersebut menimbulkan berbagai macam bentuk distorsi dalam perekonomian.

Tidak jarang ditemukan bahwa kebijaksanaan yang dirancang pemerintah sering meleset dan hanya mewakili preferensi sekelompok kecil elite masyarakat, selain relatif rendahnya tingkat kehati-hatian pemerintah dalam merancang kebijaksanaan. Fakta ini, selain dikondisikan oleh kualitas aparat yang masih rendah, juga akibat konflik kepentingan antara *interest groups*, birokrat, dan masyarakat.

Konsekuensinya, kebijaksanaan pemerintah cenderung menimbulkan distorsi dan tidak mengarah pada optimalitas Pareto. Maksudnya bahwa akan timbul dengan subur isu adanya kelompok yang diuntungkan dan kelompok yang dirugikan akibat adanya kebijaksanaan. Hal ini memberikan indikasi bahwa pada awalnya kegagalan pasar menjustifikasi campur tangan pemerintah, namun karena intervensinya terlalu jauh dan menganggap diri serba bisa dan netral, maka pada akhirnya juga menimbulkan kegagalan baru yang disebut dengan *government failure*.

Konsep Moneteris dan RATEX (Rational Expectation)

Permasalahan ekonomi yang berkepanjangan dengan ketidakberhasilan ajaran Keynes melahirkan aliran baru yang dinamakan aliran moneteris. Aliran ini dipelopori oleh Milton Friedmant dan dia sangat mengecam aliran Keyne-

sian. Pada dasarnya kelompok ini mengajukan proposisi bahwa perkembangan moneter merupakan unsur utama dalam menentukan perkembangan produksi, kesempatan kerja, dan tingkat harga. Implikasinya adalah perkembangan jumlah uang beredar merupakan variabel utama yang harus dikendalikan dalam rangka memelihara stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, perkembangan jumlah uang harus stabil dan tidak boleh melebihi perkembangan produksi.

Aliran moneteris telah menyering pendekatan Keynes dalam banyak hal. Aliran ini mengembalikan orientasi analisisnya pada konsep klasik, baik mengenai asumsi, struktur, metodologi maupun mengenai arti pentingnya uang dalam sistem perekonomian. (Deliarnov, 1997: 172).

Dalam perkembangan berikutnya, juga timbul konsep baru yang benih-benih pemikirannya juga berasal dari konsep Klasik tetapi dikemas dalam warna baru. Dalam perkembangan pemikiran ekonomi, disebut dengan *New Classical Economics* atau lebih dikenal dengan RATEX. Secara prinsip aliran pemikiran ini juga mengadopsi paradigma ekonomi klasik, yaitu mengurangi intervensi dan mengandalkan mekanisme pasar sebagai instrument pengatur alokasi sumber daya. Karena moneteris dan Raterx berpijak pada asumsi yang sama dengan pemikiran klasik, maka kelemahan-kelemahan yang melekat pada kedua mashab ini juga relatif sama dengan klasik yaitu bersifat mekanistik dan hanya beranggapan sistem ekonomi sebagai

sistem komoditas. Di samping itu, Ratemengasumsikan bahwa setiap individu mempunyai kemampuan dan akses yang sama terhadap informasi. Berdasarkan informasi itu setiap individu membentuk ekspektasi mengenai keadaan masa datang. Dengan asumsi ini, kebijaksanaan yang dilakukan pemerintah cenderung tidak mencapai sasaran sesuai dengan yang diinginkan. Oleh karena itu, Ratemenolak intervensi pemerintah. Bagi negara berkembang hal ini untuk 10 atau 20 tahun yang akan datang masih sukar diterapkan, mengingat masih terbelenggunya negara berkembang dalam aspek kelembagaan dan struktural. Misalnya, masalah kualitas sumber daya manusia yang masih rendah dan relatif tidak sama di antara Individu dalam masyarakat. Selanjutnya timbul isu bahwa kebijaksanaan pemerintah sering tidak konsisten dan transparan, dan tidak tersedianya informasi ekonomi yang akurat dan kesempatan yang sama bagi setiap pelaku ekonomi untuk memperoleh informasi. hal ini pada gilirannya menimbulkan berbagai macam bentuk distorsi dan intervensi dalam sistem perekonomian. Akibatnya, sampai dekade ini, negara berkembang pada umumnya masih diwarnai oleh mashab konsep Keynesian dan monetaris dalam merancang kebijaksanaan ekonominya.

Walaupun kedua aliran pemikiran ini masih dihindangi beberapa penyakit kronis dan membahayakan dalam upaya peningkatan *social welfare* dalam artian yang sesungguhnya.

KONSEP EKONOMI ISLAM

Ekonomi Islam berkembang secara bertahap sebagai suatu bidang ilmu interdisiplin yang menjadi bahan kajian para fuqaha', mufasir, filsuf, sosiolog, dan politikus. Sejumlah cendikiawan muslim terkemuka, seperti Abu Yusuf (w. 182 H), al-Syaibani (w.189 H), Abu Ubaid (w. 224 H), Yahya bin Umar (w. 289 H), al-Mawardi (w. 790 H), al-Ghazali (w. 505 H), Ibn Taimiyah (w. 728 H), al-Syatibi (w. 790 H), Ibn Khaldun (w. 808 H), dan lain-lain. (Adiwarman A Karim, 2004: VI), telah memberikan kontribusi yang besar terhadap kelangsungan dan perkembangan peradaban dunia, khususnya pemikiran ekonomi, melalui sebuah proses evolusi yang terjadi selama berabad-abad.

Latar belakang para cendikiawan muslim tersebut bukan merupakan ekonomi murni. Pada masa itu, klasifikasi disiplin ilmu pengetahuan belum dilakukan. Mereka mempunyai keahlian dalam berbagai bidang ilmu, mungkin faktor ini yang menyebabkan mereka melakukan pendekatan interdisipliner antara ilmu ekonomi dan bidang ilmu yang mereka tekuni sebelumnya. Pendekatan ini membuat mereka tidak memfokuskan perhatian hanya pada variabel-variabel ekonomi semata. Para cendikiawan ini menganggap kesejahteraan umat manusia merupakan hasil akhir dari interaksi panjang sejumlah faktor ekonomi dan faktor-faktor lain, seperti moral, sosial, demografi, dan politik. (Umer Chapra, 2001:150).

Konsep ekonomi para cendikiawan muslim itu berakar pada hukum, Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis Nabi Saw. Ia merupakan

hasil interpretasi dari berbagai ajaran Islam yang bersifat abadi dan universal, mengandung sejumlah perintah dan prinsip umum bagi perilaku individu dan masyarakat, serta mendorong umatnya untuk menggunakan kekuatan akal pikiran mereka.

Selama 14 abad sejarah Islam, terdapat studi yang berkesinambungan tentang berbagai isu ekonomi dalam pandangan syariah. Sebahagian besar pembahasan isu-isu tersebut terkubur dalam berbagai literatur hukum Islam yang tentu saja tidak memberikan perhatian khusus terhadap analisis ekonomi. Sekalipun demikian, apa yang diterapkan oleh pakar-pakar ekonomi Islam saat ini tidak terlepas dari pemikiran-pemikiran para cendekiawan terdahulu. Sehingga pada saat sekarang berkembangnya ekonomi syariah terutama dalam bentuk lembaga keuangan membawa angin segar untuk diterapkannya ekonomi syariah secara keseluruhan. Karena sistem ekonomi Islam berkaitan langsung dalam membentuk masyarakat, karena sistem ini merupakan implementasi tanggung jawab pribadi manusia di hadapan Allah sebagai seorang hamba.

Sejak lahirnya perbankan syariah dilandasi dengan kehadiran dua gerakan *renaissance* Islam modern: neo-revivalis dan modernis. Upaya awal penerapan sistem *profit dan loss sharing* tercatat Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940-an, yaitu adanya upaya mengelola dana jamaah haji secara nonkonvensional. Rintisan institusional lainnya adalah Islamic Rural Bank di desa Mil Ghamr pada tahun 1963 di Kairo Mesir (Antonio, 2001: 18-19).

Setelah dua rintisan awal yang cukup sederhana itu, bank

Islam tumbuh dengan sangat pesat, hingga akhir 1999 tercatat lebih dari dua rates lembaga keuangan Islam yang beroperasi diseluruh dunia, baik di negara-negara berpenduduk muslim maupun di Eropa, Australia, maupun Amerika.

Selanjutnya isu saat ini banyak nama besar dalam dunia keuangan internasional seperti: Citibank, Jardine Flemming, ANZ, Chase-Chemical Bank, Goldman Sach, dan lain-lain telah membuka cabang dan *subsidiories* yang berdasarkan syariah.

Dari perkembangan bank-bank syariah secara global, Pakistan merupakan pelopor di bidang perbankan syariah dan sistem bunga dihapuskan pada Juli 1979. Pada tahun 1981 diberlakukan undang-undang perusahaan *mudharabah* dan *murabahah*, mulailah beroperasi bank-bank komersial dengan menggunakan sistem bagi hasil, dan pada tahun 1985 seluruh sistem perbankan Pakistan dikonversi dengan sistem perbankan syariah sejalan dengan negara-negara lain seperti Mesir, Siprus, Kuwait, Bahrain, Uni Emirat Arab, Malaysia, Iran dan Turki.

KONSEP EKONOMI GLOBAL DAN KELEMBAGAANNYA

Pada kondisi sekarang, keraguan pihak baik di kalangan ekonom sendiri apalagi ilmuwan sosial lainnya seperti para sosiolog dan antropolog sangat merisaukan filosofi pemikiran ekonomi.

Sekarang ini dirasakan secara luas bahwa secara filosofis, ilmu ekonomi dan model-model

ekonomi yang dibangun sangat kering dari pijakan moral dan etik, terlepas sama sekali dari lingkungan sosial budaya di mana masyarakat berperilaku dalam menjalankan aktivitas ekonomi. Dari beberapa perkembangan model-model ekonomi tersebut selain bersifat mekanistik dan didasari atas berfikir positif rasional, juga mengabaikan aspek kelembagaan di mana ia dibangun. Berdasarkan pendekatan model ekonomi ini tidak ada satupun yang tidak dapat diukur dan dinyatakan dalam model-model ekonometrik.

Prinsip berfikir rasional telah mengiring proses pembangunan menjadi tidak berkesinambungan, kurang manusiawi dan kurang peduli pada aspek moral. Bagi kita orang Indonesia yang dikenal sebagai masyarakat yang agamis, ekonomi syariah membiarkan kondisi yang demikian terus berkembang dapat dikatakan sebagai suatu hal yang sangat naif, karena semakin menjauhkan manusia dari hakekat kehidupan yang sesungguhnya. Perilaku manusia cenderung serakah dalam memaksimalkan pencapaian tujuannya.

Fakta di atas menuntut semua kalangan terutama sekali kalangan ekonom untuk mengkonstruksi filosofi dan pendekatan berfikir yang holistik dan berpijak pada nilai-nilai moral dan etik yang dianut masyarakat, yang merupakan laboratorium bagi ilmu ekonomi dalam artian yang sesungguhnya.

Perilaku manusia yang didasari atas pijakan moral dan etik selalu diwarnai oleh dimensi vertikal disamping dimensi horizontal. Mungkin sekali seseorang yang berbuat

etik tidak mendapat imbalan dari manusia lainnya atau negara. Senada dengan ini, seseorang yang berbuat tidak etik seperti korupsi, kolusi, merampas hak rakyat kecil akan lepas dari hukum negara berkat kekayaan, kedudukan, atau kekuasaannya. Tapi dari sisi dimensi vertikal, dia tidak akan lepas dari hukuman Tuhan dan harus dipertanggungjawabkannya.

Sosok manusia yang diinginkan dengan alur berfikir ini adalah manusia etik bukan manusia ekonomi.

Berdasarkan logika berfikir di atas, konsep pemikiran ilmu ekonomi pada masa depan harus membangun *construct*, bukan model (Gordon, 1976). Format inilah yang penulis anggap relevan bagi pengembangan ilmu ekonomi pada masa depan, karena dapat menggambarkan manusia etik bukan manusia ekonomi.

Berdasarkan konstruk tersebut, mekanisme ekonomi tidak hanya ditentukan oleh interaksi permintaan dan penawaran tetapi juga oleh sistem kelembagaan yang ada seperti lembaga hukum, politik, sosial, ilmu dan teknologi, fisik dan ekonomi. Dengan dimasukkannya aspek kelembagaan ini, dalam sebuah konstruk tercermin unsur moral dan etik serta faktor-faktor non-ekonomi yang mempengaruhi perilaku ekonomi masa depan yang tidak memberikan kesan sebagai suatu ilmu yang mengajarkan keserakahan dan melahirkan manusia ekonomi, tetapi memberikan kesan suatu ilmu ekonomi yang memiliki konstruk yang relevan dan didasarkan atas asumsi yang realistik, etik, dan pada gilirannya

dapat melahirkan manusia etik.

Memperhatikan arus utama ekonomi yang telah menodai pemikiran sebagian besar para ekonom dewasa ini adalah suatu tantangan yang bersifat struktural dan kelembagaan. Pada prinsipnya, kemauan keras dan tanggung jawab moral terletak pada ekonom senior. Pada pundak mereka terletak upaya kelembagaan yang harus dilakukan. Upaya kelembagaan itu harus dimulai dari upaya merevisi kurikulum fakultas atau jurusan ekonomi pada setiap sekolah, institut dan universitas, agar mengembangkan ekonomi islam dan perbankan syariah sudah harus dimasukkan disiplin ilmu sosial lain yang relatif dekat dengan ilmu ekonomi seperti sosiologi ekonomi, antropologi ekonomi, ekonomi Islam, hukum ekonomi, islam, psikologi, agama dan politik, dan ekonomi institusi. Dengan format kurikulum yang demikian diharapkan dapat dihasilkan ekonom yang punya wawasan yang relatif holistik dan cenderung tidak berfikir secara mekanistik, melainkan memiliki pola pikir komprehensif dan sistematis. Hal ini tidak berarti setiap ekonom harus menguasai seluruh sub disiplin ilmu sosial, melainkan hanya penguasaan ilmu tersebut sepanjang ada hubungannya dengan ilmu ekonomi. Ini jelas merupakan tantangan berat dan memerlukan kreatifitas berfikir dari kalangan ekonom dan ilmuwan sosial lainnya.

PENUTUP

Dalam perkembangan konsep ekonomi telah terjadi pergeseran yang utama dalam hal filosofi yang mendasari perkembangan konsep ekonomi tersebut. Pada awalnya konsep ekonomi didasari oleh filsafat moral etik. Periode ini berlangsung dari abad XV-XVIII. Namun dalam perkembangan berikutnya, periode abad XVIII sampai sekarang, pemikiran ekonomi seolah terlepas dari pijakan filsafat moral-etik, lebih banyak diwarnai oleh filsafat positif rasional (*logical positivism*) dan pendekatannya lebih bersifat mekanistik. Filsafat ini hanya memandang sistem ekonomi sebagai komoditas.

Berdasarkan konsep tersebut, model-model ekonomi dibangun dan dinyatakan secara teknis dan mekanistik dalam bentuk model-model ekonometrik. Dalam model tersebut dikeluarkan faktor-faktor non ekonomi walaupun faktor tersebut sangat mempengaruhi perilaku ekonomi masyarakat.

Sampai dekade terkini, filosofi tersebut masih mewarnai ekonomi mulai dari Klasik, Neo-Klasik Keynesian, dan Monetaris-RATER. Satu hal yang sangat merisaukan ialah bahwa filosofi tersebut akan melahirkan manusia ekonomi yang cenderung berperilaku serakah dan brutal, karena terlepas dari pijakan moral-etik. Kemudian munculnya ekonomi Islam dengan ditandai oleh tumbuhnya bank-bank syariah di berbagai negara seperti PT. Bank Muamalat Indonesia (BMI), Bank Syariah

Mandiri{BSM}, BNI Syariah, BRI Syariah dan Bukopin Syariah di Indonesia yang konsep ekonominya berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah, terbukti telah dapat menjawab tantangan tersebut.

Konsep ilmu ekonomi yang diinginkan pada masa datang adalah konsep yang melihat sistem ekonomi selain sebagai sistem komoditas, juga sebagai sistem kelembagaan. Dengan

konsep ini, yang dibangun bukan model-model, tetapi konstruk. Dalam konstruk itu telah dimasukkan faktor-faktor non-ekonomi (sosial, politik, dan budaya) yang mendasari perilaku unit ekonomi dalam masyarakat pada gilirannya hal ini diharapkan dapat menangkap seluruh fakta ekonomi masyarakat secara komprehensif dan sistematis.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafri. 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta:Gema Insani Press
- Bromley, D.W. 1982. *Land and Water Problems: an Instructional Perspective*. A J A E A.
- Chapra, Umer. 2001. *The Future of Economics. An Islamic Perspective*. Jakarta: Shari'ah Economics and Banking Institute.
- Deliarnov, 1997, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Drucker, Peter F. 1989. *The New Realities*, Oxford.
- Jhingan, M.L. 1979. *The Economics of Development and Planning*. Vikas Publishing House. New Delhi.
- Landreth, H. dan David C. Colander. 1994. *History of Economic Thought*. Houghton Mifflin Company. New Jersey.
- Mini, Perro V. 1974. *Philosophy and Economucs*. The University Press of Florida. Gainesville.
- Raharjo, Dawan. *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*. Lembaga Studi Agama dan Filsafat. Jakarta.
- Sadono Sukirno, 2005, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suherman Rosydi, 2003, *Pengantar Teori Ekonomi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta